



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERHUBUNGAN

ꦩꦶꦏꦸꦁꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul
Jalan Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta,
55714

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANTUL**

Nomor : B/900.1.3.5/00496/KPTS/DISHUB/2025

T E N T A N G :
**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR B/900.1.3.5/00009/KPTS/DISHUB/2025
TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) SKPD,
PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) SKPD,
PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN, PENGURUS GAJI SKPD,
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2025**

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka membantu tugas PA dalam pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Perhubungan, perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - Bahwa dalam rangka pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan pada Dinas Perhubungan, perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, Pengurus Gaji SKPD;
 - Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketugasan kepegawaian pada Dinas Perhubungan, perlu menunjuk Pengurus Kepegawaian;
 - Bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan ketugasan Pengurus Barang pada Dinas Perhubungan, perlu menunjuk Pembantu Pengurus Barang;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor B/900.1.3.5/00009/KPTS/DISHUB/2025 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pengurus Gaji SKPD, Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6322);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;
 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 119 Tahun 2022 Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perhubungan;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, Pengurus Gaji SKPD, Pengurus Kepegawaian, dan Pembantu Pengurus Barang, Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas PPTK, PPK SKPD, Pembantu PPK SKPD, Pengurus Gaji SKPD, Pengurus Kepegawaian, dan Pembantu Pengurus Barang;
- a. Tugas PPTK SKPD:
- 1) Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD, meliputi:
 - a) Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b) Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
 - c) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada PA.
 - 2) Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - a) Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b) Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c) Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pelaksanaan kegiatan.
 - 3) Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa;

- b. Tugas PPK SKPD :
- 1) Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dan bendahara lainnya;
 - 2) Menyiapkan SPM;
 - 3) Melaksanakan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - 4) Melaksanakan fugsu akuntansi pada SKPD;
 - 5) Menyusun laporan keuangan SKPD;
 - 6) Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalia kelebihan pendapatan daerah dari Bendahara Penerimaan;
 - 7) Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM
- c. Tugas Pembantu PPK SKPD :
- 1) Membantu ketugasan PPK SKPD
- d. Tugas Pengurus Gaji :
- 1) Membuat daftar gaji;
 - 2) Mencatat seluruh transaksi gaji di BKU-Gaji;
 - 3) Mengumpulkan dan mengadministrasikan bukti pembayaran gaji;
 - 4) Membuat SPJ Gaji;
 - 5) Menyetor kelebihan gaji;
 - 6) Membuat LKK-Gaji terkait dengan transaksi gaji.
- e. Tugas Pengurus Kepegawaian:
- 1) Menyusun laporan kehadiran setiap pegawai per hari secara manual;
 - 2) Membuat draft surat persetujuan Cuti Pegawai;
 - 3) Pengusulan Kenaikan Pangkat;
 - 4) Pengusulan Pensiun;
 - 5) Penyusunan draft perjanjian kerja/kontrak kerja perorangan/perjanjian sederhana;
 - 6) Pembuatan berkas Kenaikan Gaji Berkala
- f. Tugas Pembantu Pengurus Barang:
- 1) Membantu Pengurus Barang dalam melaksanakan pencatatan seluruh barang milik daerah yang berada di Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah ke dalam KIB, KIR, BI, BII sesuai dengan kodefikasi dan penggolongannya;
 - 2) Membantu Pengurus Barang dalam melaksanakan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara ke dalam Kartu Pemeliharaan;
 - 3) Membantu Pengurus Barang dalam Penyusunan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Pengguna Tahunan serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;

- 4) Membantu Pengurus Barang dalam menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi;
- 5) Membantu Pengurus Barang dalam melaksanakan perhitungan barang (stock opname) sedikitnya setiap 6 (enam) bulan sekali;
- 6) Membantu Pengurus Barang dalam meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
- 7) Membantu Pengurus Barang dalam meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dokumen pengadaan;
- 8) Membantu Pengurus Barang dalam mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang;
- 9) Membantu Pengurus Barang dalam penyusunan laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang milik daerah kepada pengguna;
- 10) Membantu Pengurus Barang dalam Menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan dan pengeluaran/ penyerahan barang secara tertib dan lancar;
- 11) Membantu Pengurus Barang dalam penyusunan laporan secara periodik maupun insidental mengenai pengurusan barang yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
- 12) Membantu Pengurus Barang dalam mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, PPTK, PPK SKPD, Pembantu PPK SKPD, Pengurus Gaji SKPD, Pengurus Kepegawaian, dan Pembantu Pengurus Barang bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 4 Maret 2025

KEPALA



SINGGIH RIYADI, S.E., M.M.

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197307211997031007

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
3. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN 2:
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

Nomor : B/900.1.3.5/00496/KPTS/DISHUB/2025

Tanggal : 4 Maret 2025

T E N T A N G :

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR B/900.1.3.5/00009/KPTS/DISHUB/2025 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) SKPD, PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) SKPD, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN, PENGURUS GAJI SKPD

PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

**TAHUN ANGGARAN 2025 SUSUNAN DAN PERSONALIA
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) SKPD**

No	Nama NIP Pangkat/Golongan	Jabatan	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Kuswindarti, S.E., M.M. 197610231998032004 Pembina Tingkat I IV/b	PPTK	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

No	Nama NIP Pangkat/Golongan	Jabatan	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

No	Nama NIP Pangkat/Golongan	Jabatan	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	Toto Pamudji Rahardjo, A. KS 196806291989021001 Pembina IV/a	PPTK	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
			Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek

No	Nama NIP Pangkat/Golongan	Jabatan	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
3	Agus Sutomo, SH, M. IP. 197908172006041015 Pembina, IV/a	PPTK	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis
				Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri
				Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis
				Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret
			Gatot Sunarto,S.IP 197212011995031001 Penata TK I, III/d	PPTK
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				

No	Nama NIP Pangkat/Golongan	Jabatan	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Ditetapkan di : Bantul
 Pada tanggal : 4 Maret 2025

KEPALA



SINGGIH RIYADI, S.E., M.M.
 Pembina Tingkat I, IV/b
 NIP. 197307211997031007

LAMPIRAN 1:

KEPUTUSAN KEPALA PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

Nomor : B/900.1.3.5/00496/KPTS/DISHUB/2025

Tanggal : 4 Maret 2025

T E N T A N G :

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR B/900.1.3.5/00009/KPTS/DISHUB/2025 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) SKPD, PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) SKPD, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN, PENGURUS GAJI SKPD, PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) SKPD, PENGURUS GAJI, PENGURUS KEPEGAWAIAN, DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG SKPD

No	Nama	NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1	Mochammad Yenny, S.Kel., M.Si.	198309052010011013	Penata Tk.I, III/d	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD
2	Istiyani, S.E.,M.M	197811252010012007	Penata Tk. I, III/d	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD
3	Suharno	197407202006041010	Pengatur, II/d	Pengurus Gaji
4	Agus Riyanto	198007232008011003	Pengatur Muda Tk.I, II/c	Pengurus Kepegawaian
5	Tedi Wijayanto	198209202006041014	Penata Muda, III/a	Pembantu Pengurus Barang
6	Nisvi Sumaryanti, A.Md	199605272020122015	Pengatur, II/c	Pembantu Pengurus Barang

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 4 Maret 2025

KEPALA



SINGGIH RIYADI, S.E., M.M.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 197307211997031007